

# **PENGAWASAN IZIN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DI TEMPAT HIBURAN KOTA PEKANBARU**

Oleh: **Cynthia Mesdiyana**

(cintiamesdiana@gmail.com)

**Pembimbing : Abdul Sadad**

Program Studi Administrasi Publik - Jurusan Ilmu Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

## ***Abstract***

*Alcoholic drink are drinks contain ethanol produce from distillation which is produce by fermentation of grains, fruits and vegetables. The Government of Pekanbaru through the Department of Trade and Industry continues to strive to supervise the licenses for the sale of alcoholic beverages in Pekanbaru Entertainment Venues. These efforts are state in Minister of Trade Regulation Number 20/M-DAG/PER/4/2014 concerning Control and Supervision of the Procurement, Distribution and Sales of Alcoholic Beverages. The theoretical concept used is Supervision according to Stoner, dkk., claims that the supervision process consists of four variables, namely Determination of Standards and Performance Assessment Methods, Performance Evaluation, Comparing Performance with Standards, and Taking Corrective Action. The purpose of this study is to find out how the supervision and what factors affect the Supervision of Alcoholic Beverage Sales Permit in Pekanbaru Entertainment Venues. This research used a qualitative method with descriptive data review. In collecting the data the researchers used interview, observation and documentation techniques using purposive sampling techniques as a source of information and data analysis with qualitative descriptive methods. The results of the study showed that the Supervision of Licensing on the sale of alcoholic beverages in Pekanbaru Entertainment Venues has been carried out even though it is still not effective because lack of Human Resources, disobedience of owners of entertainment venues to the rules and lack of coordination between agencies.*

***Keywords: Supervision, Permission, Alcoholic Beverages.***

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Produksi Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) atau yang biasa dikenal sebagai minuman beralkohol di Indonesia sudah semakin meningkat. Hal ini disebabkan karena semakin banyaknya kebutuhan masyarakat tertentu akan minuman beralkohol, semakin banyaknya tempat-tempat hiburan yang menyediakan minuman ini, seperti club, cafe, bar, diskotik, karaoke dan sebagainya mulai dari kadar alkohol yang rendah hingga yang paling tinggi. Minuman beralkohol dalam kehidupan sehari-hari saat ini bukanlah hal asing lagi, bahkan saat ini dikonsumsi oleh remaja, orang dewasa, hingga orang tua. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung Etanol. Etanol adalah bahan psikoaktif yang apabila di konsumsi menyebabkan penurunan kesadaran. Minuman yang mengandung etanol dihasilkan dari penyulingan yang di produksi dengan cara fermentasi biji-bijian, buah-buahan, atau sayur-sayuran.

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol pasal 1 menyatakan minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol atau etil alkohol ( $C_2H_5OH$ ) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. Adapun dampak negatif dari minuman beralkohol dari segi kesehatan yaitu gangguan fisik, gangguan jiwa, gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, serta menimbulkan gangguan kesehatan jasmani dan rohani.

Minuman beralkohol dapat digolongkan sebagai zat Psikotropika yaitu zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif

melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas aktivitas mental dan perilaku. Oleh karena itu minuman beralkohol tidak hanya menyebabkan mabuk, akan tetapi pada tingkat tertentu dapat menyebabkan kematian.

Pekanbaru sebagai Ibukota Provinsi Riau yang sedang menuju menjadi kota metropolitan, dengan segala aktivitas yang padat dan melelahkan membuat masyarakat Kota Pekanbaru menjadi jenuh dan stress. Oleh karena itu masyarakat membutuhkan tempat hiburan yang dapat membantu menghilangkan kepenatan dan merilekskan diri dari segala aktivitas. Suatu kegiatan seperti merokok dan meminum-minuman beralkohol menjadi satu sarana untuk mempererat pergaulan ditempat hiburan sehingga peredaran minuman beralkohol ditempat hiburan menjadi tidak terkendali.

Namun tidak semua tempat hiburan yang diperbolehkan untuk menjual atau mengedarkan minuman beralkohol secara langsung, tempat hiburan yang diizinkan untuk memperjual belikan minuman beralkohol yang diminum langsung sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol pasal 14 yaitu:

1. Penjualan Minuman beralkohol untuk diminum langsung ditempat hanya dapat dijual di:
  - a. Hotel, restoran, bar sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan.
  - b. Tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh bupati/ walikota dan gubernur.
2. Penjualan Minuman Beralkohol secara eceran hanya dapat dijual oleh pengecer, pada:
  - a. Toko Bebas Bea (TBB), dan

- b. Tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh bupati/ walikota dan gubernur.

Selain sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Minuman beralkohol golongan A juga dapat dijual di *Supermarket* dan *hypermarket*.

Instansi pemerintah yang berkewajiban untuk mengatur izin peredaran minuman beralkohol ini sebagai pengendali peredarannya adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru (DPP), melalui Bidang Tertib Perdagangan dan Perindustrian pada Sub Bidang Pengawasan Perdagangan.

Dalam melakukan pengawasannya di perlukan adanya koordinasi agar kerja sama dan kemampuan aparat Pemerintah Kota Pekanbaru makin dimantapkan untuk lebih meningkatkan keserasian, kelancaran, efisiensi, dan efektivitas serta keterpaduan pelaksanaan tugas dalam melakukan pengawasan terhadap tempat penjualan minuman beralkohol. Adapun mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru akan turun langsung ke tempat-tempat hiburan untuk melihat izin penjualan minuman beralkoholnya sebanyak 2 kali dalam satu tahun.
2. Jika ditemukan tempat hiburan yang tidak memiliki izin menjual minuman beralkohol atau tidak melaporkan realisasi penjualan minuman beralkoholnya, maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian akan langsung memberikan surat peringatan. Surat peringatan ini hanya diberikan sekali.
3. Apabila surat peringatan tidak diindahkan maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian akan bertindak tegas untuk menjatuhkan sanksi yaitu berupa pencabutan izin usaha, jika izin usaha telah dicabut maka prosedur selanjutnya

harus mengurus lagi izin yang baru, dengan melampirkan laporan realisasi penjualan per triwulan setiap tanggal 10.

4. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru bersama Satpol PP Kota Pekanbaru akan melakukan razia ke tempat-tempat hiburan yang izin usaha dan izin peredaran minuman beralkoholnya sudah dicabut, mereka melakukan razia dalam jangka waktu 3 bulan sekali, untuk melihat apakah penjual minuman alkohol yang izin usaha atau izin peredaran minuman beralkoholnya sudah dicabut, sudah mengurus kembali izin mereka atau belum.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam proses pengawasan harus menjalankan mekanisme pengawasan dengan memberi surat peringatan, pencabutan izin, dan kalau dicabut harus tetap melampirkan laporan realisasi penjualan per triwulan setiap tanggal 10 ketika akan mengurus lagi surat izin yang telah dicabut. Dari 21 tempat hiburan yang memiliki izin ada 13 tempat hiburan yang tidak melaporkan realisasi penjualan, sedangkan yang diberikan surat peringatan hanya 4.

Berdasarkan mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, DPP akan turun melakukan monitoring ke berbagai tempat hiburan mencatat hasil pengawasan, mencari pelanggaran dan menentukan tindakan yang diambil. Namun pada realisasinya dilapangan, penulis menemukan bahwa mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru tidak berjalan sebagaimana mestinya. Penulis menemukan masalah dimana tidak lengkapnya hasil laporan monitoring dan pengawasan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru hanya melakukan monitoring dan pengawasan 1 (Satu) kali dalam setahun yang mana seharusnya dilakukan 2 (Dua)

kali dalam setahun dan hal ini mengakibatkan banyaknya tempat hiburan yang memperjualkan minuman beralkohol tanpa izin.

Berdasarkan fenomena- fenomena yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, seperti adanya perusahaan yang tidak memberikan laporan realisasi penjualan, izin yang sudah tidak berlaku lagi, maka dari pada itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “**Pengawasan Izin Penjualan Minuman Beralkohol di Tempat Hiburan Kota Pekanbaru**”.

### 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang telah penulis paparkan sebelumnya maka penulis menetapkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengawasan Izin Penjualan Minuman Beralkohol di Tempat Hiburan Kota Pekanbaru?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi Pengawasan Izin Penjualan Minuman Beralkohol di Tempat Hiburan Kota Pekanbaru?

### 1.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Bagaimana Pengawasan Izin Penjualan Minuman Beralkohol di Tempat Hiburan Kota Pekanbaru?
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Pengawasan Izin Penjualan Minuman Beralkohol di Tempat Hiburan Kota Pekanbaru?

### 1.4 Manfaat Penelitian

Ada pun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan untuk menambah pengetahuan dan menjadi tambahan ilmu tentang administrasi publik khususnya kebijakan publik dan juga sebagai bahan

informasi bagi peneliti atau pihak lain yang ingin melanjutkan penelitian dengan permasalahan yang sama dan memberikan gambaran yang nyata mengenai Bagaimana Pengawasan Izin Penjualan Minuman Beralkohol di Tempat Hiburan Kota Pekanbaru.

#### 2. Manfaat Praktis

- a. Dapat menjadi peningkatan dan mengembangkan kemampuan penulis untuk mengetahui bagaimana Bagaimana Pengawasan Izin Penjualan Minuman Beralkohol di Tempat Hiburan Kota Pekanbaru.
- b. Memberikan bahan masukan yang bermanfaat bagi pihak-pihak terkait untuk pertimbangan dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat mengenai masalah minuman beralkohol ditempat hiburan kota pekanbaru.

## 2. KONSEP TEORI

### 2.1. Teori Manajemen

Selanjutnya, **Bangun (2012: 5)** , dijelaskan bahwa fungsi-fungsi manajemen adalah perencanaan (*planning*), pengorganisaian (*organizing*), penyusunan staf (*staffing*), penggerakan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Fungsi-fungsi manajemen tersebut merupakan tugas bagi setiap manajer pada berbagai bidang dan tingkatan dalam organisasi.

Menurut **Iskandar (2005:5)** Berpendapat bahwa pemanfaatan utama manajemen adalah untuk mengelola program kerja melalui proses-proses perencanaan, pengawasan atau pelaksanaan dan perencanaan ulang, agar tujuan program tersebut dapat tercapai secara efisien.

Menurut **Yusup (2012: 12)** Ada 3 (tiga) alasan yang menjadi sebab manajemen dibutuhkan oleh semua organisasi. Tanpa manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. Alasan itu adalah:

- 1) Untuk mencapai tujuan. Manajemen dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan yang telah terlebih dahulu ditetapkan. Dengan pengelolaan yang baik, maka pencapaian tujuan juga diharapkan berjalan secara baik.
- 2) Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Manajemen dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam organisasi, seperti ketua dan anggota, pemilik dan karyawan, pemerintah dengan masyarakat, dan sebagainya.
- 3) Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Efisiensi adalah kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar. Hasil (*output*) harus maksimal dengan biaya yang minimal (*input*). Efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

## 2.2. Teori Pengawasan

Menurut **Berman** dalam **Hamdi (2014:101)** implementasi kebijakan terjadi pada dua level. Pada level implementasi-makro, aktor yang berlokasi di pusat menetapkan suatu program pemerintah dan pada level implementasi-mikro, organisasi lokal memberikan reaksinya terhadap rencana level makro, mengembangkan program mereka sendiri, dan mengimplementasikannya. Dibawah kondisi tersebut, menurut penganut paham *bottom-up*, kalau para pelaksana di level lokal tidak diberi kebebasan untuk mengadaptasikan program dengan kondisi lokal, maka program tersebut cenderung gagal.

Para penganut paham *bottom-up* berpendapat bahwa tujuan, strategi, aktivitas, dan kontak dari para aktor yang terlibat dalam proses implementasi-mikro

harus dimengerti dalam upaya memahami implementasi. Senyatanya, pada level mikrolah kebijakan secara langsung mempengaruhi masyarakat. Pengaruh kebijakan terhadap tindakan birokrat pelaksana (*street-level bureaucrats*) harus dievaluasi dalam upaya memprediksi dampak atau akibat yang dihasilkan oleh suatu kebijakan.

Menurut **George C. Edward III** dalam **Nawawi (2009:136)**, mengatakan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

### 1. Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu transformasi informasi (*trasmisi*), kejelasan informasi (*clarity*) dan konsistensi informasi (*consistency*). Dimensi tranformasi menghendaki agar informasi yang jelas dan mudah dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan. Sedangkan dimensi konsistensi menghendaki agar informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait.

### 2. Sumber Daya (*Resources*)

Sumber daya berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan yang dijelaskan sebagai berikut:

#### a. Sumber Daya Manusia (Staff)

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan

dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kualitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia yang kehandalan sumber daya manusia, implementasi kebijakan akan berjalan lambat.

- b. Anggaran (Budgetary)  
Anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran.
  - c. Fasilitas (Facility)  
Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas yang layak, seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan.
  - d. Informasi dan kewenangan (Information and Authority)  
Informasi juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan, terutama informasi yang relevan dan cukup terkait bagaimana mengimplementasikan suatu kebijakan. Sementara wewenang berperan penting terutama untuk meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki.
3. Disposisi (Disposition)

Kecendrungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi.

Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

#### 4. Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure)

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat standar operation prosedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

### 2.3. METODE PENELITIAN

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Dimana deskriptif kualitatif ini dapat diartikan sebagai metode yang menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan

situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi didalam masyarakat. Penelitian kualitatif menurut **Arifin (Agustinova, 2015)** adalah suatu prosedur penelitian yang dilakukan secara alamiah sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan tanpa adanya rekayasa dan jenis data yang dikumpulkan berupa data deskriptif

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di kota Pekanbaru. Alasan pengambilan lokasi tersebut karena berdasarkan pantauan dilapangan saat ini Kota Pekanbaru sebagai Ibukota Provinsi Riau yang mana masih banyak terjadinya permasalahan dalam pengawasan minuman beralkohol dikota pekanbaru seperti, Salah satunya masih adanya tempat hiburan umum yang masih memperjual belikan minuman beralkohol walaupun izin penjualannya telah mati, masih adanya tempat hiburan yang tidak melakukan pengiriman laporan penjualan minuman beralkohol kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian kota Pekanbaru.

## 1. Informan penelitian

Informan adalah seseorang yang menjadi narasumber dalam penelitian untuk memberikan keterangan dan sebagai sumber informasi untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian. Kriteria dalam memilih informan penelitian ini adalah informan penelitian mengetahui dengan baik tentang permasalahan mengenai Pengawasan Izin Penjualan Minuman Beralkohol di Tempat Hiburan Kota Pekanbaru. Untuk memperoleh informan peneliti menggunakan teknik purposive sampling. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang

peneliti harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelaskan objek atau situasi sosial yang akan diteliti. Adapun yang dijadikan informan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Seksi Perdagangan dan Hukum Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.
- b. Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Satpol PP Kota Pekanbaru.
- c. Operasional Manager Hangout Cocktail Bar dan Kitchen
- d. Manager New Paragon.

Pada penelitian ini juga menggunakan snowball sampling, di mana sampel diperoleh melalui proses bergulir dari satu responden ke responden lainnya, biasanya metode ini digunakan untuk menjelaskan pola-pola sosial dan komunikasi (sosiometrik) suatu komunikasi tertentu. Atau dengan kata lain, dalam penentuan sampel, pertama-tama di pilih satu atau dua orang, tetapi karena dengan dua orang ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang di pandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang di berikan oleh dua orang sebelumnya. Begitu seterusnya, adapun informannya yaitu pelaku usaha.

## 2. Sumber Data

Data yang dikumpulkan kemudian dianalisa terdiri dari data primer dan sekunder, yaitu:

Data primer ialah data yang diperoleh langsung dari informan dilapangan yang menjadi subjek penelitian, berupa informasi yang relevan dengan masalah-masalah yang sudah dirumuskan dalam penelitian. Penelitian lapangan tersebut dilakukan untuk mendapatkan informasi maupun data seakurat dan seobjektif mungkin, sehingga dapat menggambarkan

kondisi sesuai fakta yang ada dilapangan. Baik melalui observasi maupun wawancara.

#### **1.4.1. Data primer**, ini diperoleh dari:

1. Melakukan wawancara dengan informan penelitian yang terkait dengan Pengawasan izin Penjualan Minuman Beralkohol di Tempat Hiburan Kota Pekanbaru.
2. Melalui observasi lapangan yang dilakukan di Kawasan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.

#### **3.4.2 Data Sekunder**

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data yang dikumpulkan oleh peneliti ini, hanya sebagai penunjang dari data primer, sumber data ini bisa diperoleh langsung melalui peraturan Menteri Perdagangan nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, buku-buku, jurnal ilmiah dan data lainya yang relevan dengan tujuan penelitian.

#### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

##### a. Observasi (pengamatan)

Mengamati secara langsung objek yang akan diteliti guna untuk mengetahui sejauh mana pengawasan izin penjualan minuman beralkohol ditempat hiburan kota pekanbaru.

##### b. Interview (wawancara)

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada responden atau informasi tentang pengawasan izin penjualan minuman beralkohol ditempat hiburan kota pekanbaru.

##### c. Dokumentasi

Dengan pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dokumen bertujuan untuk melengkapi data yang bersumber dari dokumen yang ada

hubunganya dengan peneliti yaitu berupa, file, foto dan sebagainya.

#### **4. Analisis Data**

Dalam penelitian ini menggunakan analisis data yang bersifat interaktif (Creswell, 2016), dengan langkah-langkah analisis data kualitatif sebagai berikut, dalam langkah-langkah analisis data kualitatif sebagai berikut:

- a. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan transkripsi wawancara, men-*scanning* materi, mengetik data lapangan, atau memilah-milah dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.
- b. Membaca keseluruhan data. Langkah pertama adalah membangun *general sense* atau informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan. Gagasan umum apa yang terkandung dalam perkataan partisipan? Bagaimana nada gagasan-gagasan tersebut? Bagaimana kesan dari kedalaman, kredibilitas, dan penuturan informasi itu?
- c. Menganalisis lebih detail dengan meng-*coding* data. *Coding* merupakan proses mengolah materi/informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya. Langkah melibatkan beberapa tahap: mengambil data tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan, mensegmentasikan kalimat-kalimat atau gambar-gambar tersebut ke dalam kategori-kategori, kemudian melabeli kategori-kategori ini dengan istilah-istilah khusus, yang sering kali didasarkan pada istilah/ bahasa yang benar-benar berasal dari partisipan.
- d. Tahapan proses *coding* untuk mendeskripsikan *setting*, orang-orang, kategori-kategori, dan tema-tema yang akan dianalisis. Deskripsi ini melibatkan

usaha penyampaian informasi secara detail mengenai orang-orang, lokasi-lokasi, atau peristiwa-peristiwa dalam situasi tertentu.

e. Menghubungkan tema-tema atau deskripsi-deskripsi dalam suatu rangkaian cerita, dalam menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema tersebut akan disajikan kembali dalam narasi/laporan kualitatif.

f. Reduksi data

Pada tahap ini dilakukan proses pemilihan, pemusatan perhatian ada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan lapangan sehingga menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

g. Penyajian data

Selanjutnya dilakukan penyajian data. Penyajian yang dimaksud adalah sekumpulan informasi tersusun yang member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian yang digunakan pada penelitian ini adalah bentuk teks naratif, dimana peneliti akan menyederhanakan informasi yang kompleks ke dalam kesatuan bentuk yang disederhanakan dan selektif yang mudah dipahami.

h. Menarik kesimpulan dan verifikasi

Dari permulaan pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti benda-benda, pola-pola penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan terakhir tergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodean, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan. Namun disini penarikan kesimpulan hanya sebagian dari suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Pembuktian kembali atau verifikasi dapat

dilakukan untuk mencari pembenaran dan persetujuan sehingga validitas dapat tercapai.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini penulis akan memaparkan hasil penelitian yang peneliti lakukan selama di lapangan dengan judul Implementasi Kebijakan Tentang Upaya Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue di Kota Pekanbaru. Dan peneliti melakukan analisis fenomena di lapangan dengan menggunakan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 581/Menkes/SK/VII/1992 tentang Upaya Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue.

### **A. Implementasi Kebijakan Tentang Upaya Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue di Kota Pekanbaru**

Pembentukan kebijakan Menteri Kesehatan yang dibuat untuk mendukung pemberantasan penyakit Demam Berdarah *Dengue* disusun dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 581/Menkes/SK/VII/1992 tentang Upaya Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue, Bab VI tentang Upaya Pemberantasan meliputi:

1. Pencegahan.
2. Penemuan, Pertolongan dan Pelaporan.
3. Pengamatan Penyakit dan Penyelidikan Epidemiologi.
4. Penanggulangan Seperlunya.

Dimana hal tersebut nantinya dapat menekan penyebaran penyakit Demam Berdarah *Dengue* sehingga jumlah kasus penderita penyakit Demam Berdarah *Dengue* bisa diturunkan. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan peran serta dari seluruh elemen masyarakat untuk ikut andil dalam mensukseskan jalannya kebijakan

tentang Upaya Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah *Dengue*, karena hal ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja. Adanya kerja sama antar semua pihak bisa mewujudkan tujuan dari dibuatnya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

### 1. Pencegahan

Mengenai upaya pencegahan penyakit Demam Berdarah *Dengue* yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dan instansi kesehatan atau Puskesmas yaitu dengan melakukan sosialisasi ke masyarakat tentang gerakan satu rumah satu jumantik (Juru pemantau jentik), penyuluhan tentang upaya pencegahan penyakit Demam Berdarah *Dengue*, Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN), kegiatan Ovitrap dan pemberian bubuk abate kepada masyarakat atau abatisasi.

#### a. Sosialisasi Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik

Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dan Instansi kesehatan atau Puskesmas tidak berjalan dengan baik karena masih banyak masyarakat yang tidak mengerti dengan Gerakan satu rumah satu jumantik. Hal tersebut dikarenakan kurang intensifnya Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dan Puskesmas dalam mempropagandakan programnya ditambah lemahnya akses untuk mensosialisasikan ke masyarakat secara langsung.

b. Penyuluhan Upaya Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah *Dengue*  
penyuluhan tentang upaya pemberantasan penyakit Demam Berdarah *Dengue* yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru kepada masyarakat baik yang dilakukan didalam atau diluar gedung maupun menggunakan mobil pengeras suara secara langsung tidak berjalan sebagaimana semestinya. Hal

tersebut karena minimnya intensitas kegiatan penyuluhan mengenai penyakit Demam Berdarah *Dengue* karena perilaku masyarakat yang tidak mau untuk mengikuti dan melaksanakan apa yang sudah disampaikan.

#### c. Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN)

implementasi dari Kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru kurang efektif, disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk dan juga karena kegiatan ini dilakukan ketika sudah terjadinya kasus Demam Berdarah *Dengue* sehingga menyebabkan lingkungan masyarakat menjadi semakin berpotensi terjangkit penyakit Demam Berdarah *Dengue*.

#### d. Abatisasi

implementasi dari upaya pencegahan dengan kegiatan abatisasi tidak berjalan dengan baik karena masih banyak masyarakat yang harus membeli bubuk abate yang seharusnya diberikan secara gratis oleh Puskesmas yang ada didaerah tempat tinggal mereka. Kemudian karena bubuk abate ini bersifat kimiawi yang mengandung racun, sehingga masyarakat takut untuk menggunakannya. Rendahnya tingkat penggunaan bubuk abate oleh masyarakat yang menyebabkan upaya pencegahan penyakit Demam Berdarah *Dengue* melalui kegiatan abatisasi menjadi kurang efektif. Hal ini dapat dikendalikan dengan tindakan turun tangan oleh petugas dari Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru untuk membagikan bubuk abate tersebut dan memberikan penyuluhan tentang bagaimana penggunaan dari bubuk abate, sehingga dapat mendorong keinginan masyarakat untuk menggunakan bubuk abate tersebut.

## **2. Penemuan, Pertolongan dan Pelaporan**

Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru sudah menjalankan upaya pemberantasan penyakit Demam Berdarah *Dengue* dengan kegiatan Penemuan, Pertolongan dan Pelaporan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 581/Menkes/SK/VII/1992 tentang Upaya Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah *Dengue*. Tetapi belum berjalan efektif karena tidak adanya sosialisasi kemasyarakat terlebih dahulu bahwa untuk kegiatan pelaporan ketika ada anggota keluarga yang terkena Penyakit Demam Berdarah *Dengue* wajib dilakukan oleh masyarakat sehingga Dinas Kesehatan ataupun Puskesmas setempat tidak bisa melakukan tindakan selanjutnya untuk memberantas penyebaran penyakit Demam Berdarah *Dengue*.

Laporan dari masyarakat langsung sangat dibutuhkan oleh Dinas Kesehatan untuk mengetahui dari penyebaran penyakit Demam Berdarah *Dengue*. Dengan kata lain bahwa partisipasi aktif dari masyarakat dapat membantu Dinas Kesehatan dan Instansi Kesehatan lainnya dalam hal melakukan upaya pemberantasan penyakit Demam Berdarah *Dengue* sehingga dapat menurunkan jumlah penderita penyakit Demam Berdarah *Dengue* di Kota Pekanbaru.

## **3. Pengamatan Penyakit dan Penyelidikan Epidemiologi.**

Mereka telah menjalankan tugasnya sesuai dengan protab yang telah ditetapkan dan melalui proses yang panjang. Akan tetapi penyelidikan epidemiologi sering terlambat dilakukan karena lamanya laporan yang diterima pihak Puskesmas dari Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru sehingga penanganan secara cepat tidak dapat dilakukan, hal tersebut menyebabkan penyebaran penyakit Demam Berdarah *Dengue* semakin meningkat. Selain itu tidak

adanya inisiatif petugas untuk melakukan pengamatan langsung dilingkungan masyarakat, hal tersebut yang menyebabkan jumlah penderita di Kota Pekanbaru menjadi meningkat setiap tahunnya.

## **4. Penanggulangan Seperlunya**

Upaya Penanggulangan Seperlunya yang dilakukan Dinas Kesehatan yaitu dengan Kegiatan *Fogging* karena *Fogging* dapat membunuh langsung nyamuk dewasa dan memutus mata rantai penyebarannya. Akan tetapi kegiatan *Fogging* yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru tidak bisa diimplementasikan dengan optimal karena kegiatan *Fogging* dianggap kurang baik untuk dilaksanakan karena mengandung racun insektisida, sehingga mendapat banyak penolakan dari masyarakat karena masyarakat takut terkena dari racun insektisida tersebut dan dapat mengganggu kesehatan.

## **B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi**

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi berdasarkan Teori Edward III yang peneliti gunakan yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan tentang Upaya Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah *Dengue* di Kota Pekanbaru sebagai berikut ini:

### **1. Komunikasi**

Komunikasi merupakan alat kebijakan untuk menyampaikan informasi, yang mana hal ini berkenaan dengan bagaimana suatu kebijakan disosialisasikan kepada organisasi atau publik dan adanya dampak yang timbul dari komunikasi tersebut. Informasi perlu disampaikan kepada para pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, dan arah kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, agar proses implementasi kebijakan bisa

berjalan dengan efektif sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.

a. Informasi Kebijakan

sosialisasi mengenai kebijakan tentang upaya pemberantasan penyakit Demam Berdarah *Dengue* yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru kepada Puskesmas dan masyarakat telah dilakukan. Informasi disampaikan dengan cara penyuluhan secara langsung dengan perwakilan Puskesmas bidang Demam Berdarah *Dengue* dan dengan menggunakan media sosial. Bentuk informasi yang disampaikan yaitu mulai dari cara pencegahan, pelaporan penyakit, dan cara melakukan kegiatan Penyelidikan Epidemiologi. Namun setelah Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru telah melakukan Sosialisasi kepada Puskesmas, jumlah penderita penyakit Demam Berdarah *Dengue* semakin meningkat di Kota Pekanbaru karena informasi yang diperoleh oleh Puskesmas tidak terealisasi secara maksimal disampaikan kepada masyarakat.

b. Kejelasan kebijakan

Kebijakan yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru kepada Puskesmas sudah cukup jelas karena informasi yang disampaikan sudah sesuai dengan isi dari kebijakan dan sesuai dengan petunjuk teknis pemberantasan penyakit Demam Berdarah *Dengue* dari Kementerian Kesehatan. Namun komunikasi antara Dinas Kesehatan, Puskesmas dan masyarakat yang bersifat satu arah membuat tujuan dari sosialisasi kebijakan menjadi tidak sampai kemasyarakat sehingga banyak masyarakat yang tidak tahu kebijakan tentang upaya pemberantasan penyakit Demam Berdarah *Dengue* tersebut.

## 2. Sumber Daya

masalah dana ternyata juga menjadi kendala dalam menjalankan kebijakan tentang upaya pemberantasan Demam Berdarah *Dengue* di Kota Pekanbaru ini,

kurangnya anggaran yang tersedia membuat banyaknya kegiatan yang menjadi terhambat dan tidak berjalan, selain itu anggaran juga berpengaruh terhadap fasilitas-fasilitas yang tersedia, fasilitas yang dimaksud seperti alat operasional dan gedung untuk kegiatan penyuluhan.

## 3. Disposisi/Sikap Pelaksana

Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru memiliki wewenang penuh dalam mengimplementasikan kebijakan tetapi untuk upaya pemberantasan penyakit Demam Berdarah *Dengue* dengan Penyelidikan Epidemiologi itu dilimpahkan oleh pihak Puskesmas tetapi dengan persetujuan dari Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru sebagai pelaksana kebijakan. Tetapi Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru belum memiliki komitmen yang kuat dalam menjalankan kebijakan seperti dalam hal penyuluhan, Dinas Kesehatan hanya melakukan penyuluhan ke Puskesmas dan menugaskan Puskesmas untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat.

## 4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dapat mempengaruhi implementasi kebijakan tentang upaya pemberantasan penyakit Demam Berdarah *Dengue* berdasarkan aspek Standar Operasional Prosedur, untuk saat ini Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru belum memiliki Standar Operasional Prosedur akan tetapi Semua Kegiatan pemberantasan dijalankan berdasarkan Petunjuk Teknis Pengendalian Demam Berdarah *Dengue* Kota Pekanbaru.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Berdasarkan dari data primer dan data sekunder disertai empat indikator Implementasi Kebijakan tentang Upaya Pemberantasan Penyakit Demam

Berdarah *Dengue* di Kota Pekanbaru belum efektif karena:

- a. Pencegahan, dilihat dari kegiatan sosialisasi yang dilakukan tidak berjalan dengan baik karena masih banyak masyarakat yang tidak mengerti dengan Gerakan satu rumah satu jumentik. Kemudian minimnya intensitas kegiatan penyuluhan mengenai penyakit Demam Berdarah *Dengue*. Selanjutnya kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk dan juga karena kegiatan ini dilakukan ketika sudah terjadinya kasus Demam Berdarah *Dengue*. Serta kegiatan abatisasi tidak berjalan dengan baik karena masih banyak masyarakat yang harus membeli bubuk abate yang seharusnya diberikan secara gratis.
  - b. Pertemuan, pertolongan dan Pelaporan, belum berjalan efektif karena tidak adanya sosialisasi kemasyarakat terlebih dahulu.
  - c. Pengamatan Penyakit dan Penyelidikan Epidemiologi, sering terlambat dilakukan karena lamanya laporan yang diterima pihak Puskesmas dari Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.
  - d. Penanggulangan Seperlunya, upaya Penanggulangan Seperlunya yang dilakukan Dinas Kesehatan yaitu dengan Kegiatan *Fogging* Akan tetapi tidak bisa diimplementasikan dengan optimal karena mendapat banyak penolakan dari masyarakat.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan tentang Upaya Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah *Dengue* di Kota Pekanbaru berdasarkan hasil penelitian adalah

Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Komunikasi antara Dinas Kesehatan, Puskesmas dan masyarakat yang bersifat satu arah membuat tujuan dari sosialisasi kebijakan menjadi tidak sampai kemasyarakat. Sumber Daya kurangnya staff dan anggaran yang tersedia membuat banyaknya kegiatan yang menjadi terhambat dan tidak berjalan. Disposisi/Sikap Pelaksana belum memiliki komitmen yang kuat dalam menjalankan kebijakan seperti dalam hal penyuluhan. Struktur Birokrasi dimana SOP yang mengatur upaya pemberantasan penyakit Demam Berdarah *Dengue* belum ada baik dari Dinas maupun Puskesmas.

3.

#### **B. Saran**

1. Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dalam melakukan upaya pemberantasan Penyakit Demam Berdarah *Dengue* perlu meningkatkan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan bekerja sama dengan Puskesmas dalam kegiatan penyuluhan sehingga dapat lebih intensif memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang perlunya perilaku hidup bersih dan sehat. Serta peningkatan partisipasi masyarakat melalui kegiatan pemberantasan sarang nyamuk secara rutin.
2. Bagi masyarakat diharapkan untuk meningkatkan kesadaran untuk hidup bersih dan sehat serta peduli akan kebersihan lingkungan sekitar karena bersih dan sehat itu harus dimulai dari diri sendiri. Selanjutnya masyarakat sebaiknya tidak membiarkan persediaan air selama berhari-hari terbuka dan melakukan pengaturan yang benar, sehingga dapat mencegah terjadinya tempat perkembangbiakan nyamuk penyebab penyakit Demam Berdarah *Dengue*.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Agustinova, E. D. (2015). *Memahami Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Calpulis.
- Baharudin.(2014). *Dasar-DasarManajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Efendi, Usman. (2015). *AsasManajemen*. Jakarta: PT Raja GrafindoPersada.
- Hasibuan, M. S. P. (2016). *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah (Revisi)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Iskandar, Kasim. 2005. *Manajemen Perubahan, Bandung*. Alfabeta.
- Sarundajang, H. 2005. *Babak baru sistem pemerintah daerah. Jakarta. Kata Hasta Pustaka*.
- Darwis, 2000. *Dasar- Dasar Manajemen (suatu pengantar), Perkanbaru UNRI*
- Karyoto. (2016). *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Noor, Juliansyah. (2015). *PenelitianIlmuManajemen*. Jakarta: PrenadamediaGrup.
- Manullang, M. (2015). *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Yusup, M. Pawit. 2012. *Perspektif Manajemen Pengetahuan Informasi, Komunikasi, Pendidikan, dan Perpustakaan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Saefullah, dan Ernie.2005. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Grasindo
- Athoillah, Anton.2010. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Pustaka Setia.
- Siagian, P Sondang.2003. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasibuan, Malayu. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Manullang. 2012. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RAD*. Bandung: Alfabeta Bandung.
- Tianawati, Ernie Sule. Dkk.(2015).*PengantarManajemen*. Jakarta: PrenadamediaGrup.

- Wibowo. (2016). *Manajemen Kinerja* (5th ed.). Jakarta: Raja Grafindo Persada.

### JURNAL

- Kasmawati.N. (2016). *Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 8 thn 2016 Tentang Larangan Peredaran Minuman Beralkohol dan Pengawasannya di Kecamatan Minamu Kabupaten Jeneponto*. *E\_JUERNAL PPKN*, 3(3), 7.
- Satyo.T. (2017). *Peran Satpol PP dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang, Pengendalian, Pengawasan, Penertiban, dan Peredaran Minuman Beralkohol (Studi Di Kecamatan wangon Kabupaten Banyumas)*. *E\_JURNAL FISIP*, 1 (4), 1.
- David.R.H,ST. (2017). *Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan, Pengendalian Dan Pelarangan Peredaran Minuman Beralkohol Di Kota Pontianak*. *E\_JURNAL HUKUM*, 3(4), 4.
- Bonita. I. (2018). *Pelaksaan Pasal 16 Ayat (2) C Peraturan Daerah Kabupaten Melawai Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengawasan Penedgalian Peredaran Dan Penjualan Minuman Alkohol Di Warung Kaki Lima, Terminal, Kios-Kios Kecil Di Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawai*. *E\_JURNAL HUKUM*, 1 (5), 3.
- Purmati. (2014).*Pelaksanaan Pengawasan*

*Penjualan Minuman Alkohol Di Kota Samarinda (Analaisis Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pengawasanperedaran Minuman Beralkohol. E\_JURNAL BERAJA, 2 (5) ,2.*

#### **DOKUMEN**

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tempat Hiburan.